

Analisis Pembangunan Wilayah Tertinggal di Provinsi Jawa Timur (*Analysis Development of Disadvantaged Areas in East Java Province*)

Satria Wiratama, Herman Cahyo Diartho*, Fajar Wahyu Prianto
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: hermancahyodiartho@gmail.com

Abstrak

Pembangunan daerah di wilayah tertinggal merupakan upaya mengembangkan potensi-potensi ekonomi sehingga mempunyai daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi serta kinerja sektor ekonomi setiap wilayah tertinggal di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data PDRB, dengan alat analisis Location Quotient dan Shift Share Esteban Marquillas, yang terdiri dari data times series selama periode 2009-2013, dengan menggunakan PDRB 9 sektor dan data cross section 4 kabupaten tertinggal di Jawa Timur. Hasil analisis Location Quotient sektor basis di Kabupaten Bondowoso (pertanian), Situbondo (pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran), Sampang (pertanian, pertambangan dan penggalian), Bangkalan (pertanian, bangunan dan jasa-jasa). Hasil analisis Shift Share sektor kompetitif di Kabupaten Bondowoso (pertanian, pengolahan, listrik, gas dan air bersih dan bangunan), Situbondo (pertanian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih), Sampang (pertanian, industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa), Bangkalan (pertanian, industri pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa). Dibutuhkan prioritas pembangunan, pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Sektor Basis, dan Keunggulan Kompetitif

Abstract

Regional development in disadvantaged areas in an effort to develop the economic potential so as to have competitiveness and boost economic growth. This study aimed to analyze the economic potential and economic performance of the sector in each region lagging East Java Province that could affect GRDP growth and could be a priority in the implementation of regional development. This study uses secondary data in the form GRDP data, with analysis tools Location Quotient and Shift Share Esteban Marquillas, which consist of the data time series during the period from 2009 to 2013, using the GRDP 9 sectors and cross section 4 underdeveloped districts in East Java. The result of this study indicate that the tool Location Quotient, a sector basis contained in the district of Bondowoso is the agricultural sector, a sector basis in Situbondo district is agricultural sector, trade, hotels and restaurants sector, a sector basis in Sampang district is agricultural sector, mining and quarrying sector, a sector basis in Bangkalan district is agricultural sector, construction sector and services sector. From the analysis of the Shift Share Esteban Marquillas sector with competitiveness (competitive) in the Bondowoso district is agricultural sector, manufacturing sector, electricity, gas and water supply sector, construction sector. A competitive sector in Situbondo district is agricultural sector, manufacturing sector, electricity, gas and water supply sector. A competitive sector in Sampang district is agricultural sector, manufacturing sector, trade, hotels and restaurants sector, finance, leasing and corporate services sector, services sector and a competitive sector in Bangkalan district is agricultural sector, manufacturing sector, trade, hotels and restaurants sector, finance, leasing and corporate services sector and services sector. The overall results of these studies demonstrate the implications that the development in disadvantaged areas still not evenly so that it takes the development priorities like as developing the local economy through the use of local resources and community empowerment through increased people's access to education and health services, job creation and the ability to utilize and manage the market.

Keywords: Gross Regional Domestic Product, Base Sector and Competitive Advantage

Pendahuluan

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan aspek ekonomi terhadap kehidupan sosial semata. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik (Kuncoro,2000). Dalam pembangunan suatu negara tidak terlepas dari pembangunan daerah secara merata sebagaimana pendapat menurut Lincoln Arsyad (2010) yang menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Namun dalam proses keberlangsungan pembangunan suatu daerah pastinya terdapat permasalahan pokok yang mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi antar daerah/wilayah karena kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mendorong proses pembangunan tidaklah sama.

Kuncoro (2002) menyebutkan salah satu kriteria pembagian daerah dalam ketimpangan wilayah yaitu daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) yang merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menyebutkan bahwa daerah/wilayah tertinggal merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta

* Corresponding Author

masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Mengatasi permasalahan kesenjangan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001 untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam membiayai dan melaksanakan pembangunannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menjelaskan mengenai kewenangan pemerintah daerah mencakup kewenangan dalam hal pemerintahan, pengelolaan sumberdaya nasional wilayahnya dan bertanggung jawab melaksanakan serta memelihara kesejahteraan lingkungannya.

Teori basis ekonomi yang dikemukakan oleh Harry W. Richardson menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad 1999:116). Sehingga dalam memacu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi wilayahnya. Rustiadi dkk (2011:179) menyatakan bahwa dalam suatu daerah, sektor ekonomi dibagi menjadi 2 (dua) sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis dimana perbedaannya terletak pada kelebihan dan kekurangan dalam proses pemenuhan kebutuhan yang menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah.

Sektor basis yang menjadi penentu utama dalam memicu pertumbuhan perekonomian suatu wilayah atau negara, juga terdapat keunggulan kompetitif yang dimiliki setiap sektor. Hal ini dijelaskan dalam teori daya saing yang merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002). Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing salah satu indikatornya yaitu keunggulan kompetitif, yang merupakan kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya ke luar daerahnya. Sehingga pendapatan wilayah tersebut selain diperoleh dari wilayahnya juga diperoleh dari wilayah lainnya (Tarigan, 2002).

Dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut dibutuhkan perencanaan yang baik sebagaimana dijelaskan oleh Tarigan (2007) yang menyebutkan dalam perencanaan wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisis potensi ekonomi suatu wilayah yang selanjutnya digunakan untuk menentukan sektor-sektor riil yang memiliki keunggulan yang lebih baik untuk dikembangkan. Salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat PDRB suatu wilayah tersebut. Menurut Tarigan (2007:46), pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi), yang secara kasar menggambarkan kemakmuran daerah tersebut.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang penerimaan pendapatan negara terbesar yang didukung oleh melimpahnya sumber daya alam yang ada serta sektor-sektor ekonomi lainnya yang berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Namun hal tersebut masih belum didukung dengan pemerataan pembangunan di setiap kabupaten Provinsi Jawa Timur. Sehingga Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2014 menetapkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki 4 (empat) kabupaten yang dianggap tertinggal antara lain yaitu kabupaten

Bondowoso, kabupaten Situbondo, kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

Dari latar belakang di atas, maka dibutuhkan perencanaan untuk menganalisis sektor apa saja yang mempunyai potensi untuk menggerakkan ekonomi daerah dan juga sektor apa yang menjadi sektor kompetitif di setiap wilayah tertinggal sehingga nantinya sektor-sektor tersebut dapat dijadikan sektor prioritas pembangunan untuk meningkatkan perekonomian di setiap wilayah tertinggal yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Metode

Rancangan atau Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif, di mana dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran untuk memahami karakteristik objek dari suatu penelitian dalam beberapa aspek secara sistematis (Surakhmad, 2001).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan data publikasi lainnya. Data variabel yang digunakan merupakan data tahunan pada rentang periode 2009-2013.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu wilayah tertinggal di Jawa Timur yang terdiri dari kabupaten Bondowoso, kabupaten Situbondo, kabupaten Bangkalan dan kabupaten Sampang.

Metode Analisis Data

Analisis Shift Share Esteban Marquillas

Analisis shift share digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di suatu daerah. Secara ringkas, analisis shift share dapat dijelaskan bahwa perubahan suatu variabel regional suatu sektor di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri dan keunggulan kompetitif (Tarigan, 2004:86). Persamaan Shift Share yang direvisi ini mengandung suatu unsur baru yaitu *homothetic production* di sektor i di wilayah j , diberi notasi E'_{ij} dan dirumuskan sebagai :

$$E'_{ij} = E_j(E_{in}/E_n)$$

Dengan mengganti nilai output nyata E'_{ij} dengan *Homothetic Production* E'_{ij} maka persamaannya menjadi :

$$C'_{ij} = E'_{ij}(r_{ij} - r_n)$$

Notasi C'_{ij} mengukur keunggulan atau ketidakunggulan kompetitif di sektor i diperekonomian suatu wilayah j . Pengaruh efek alokasi (*Allocation Effect*) belum dijelaskan dari suatu variabel wilayah untuk sektor i di wilayah j (A_{ij}), untuk mengetahui efek alokasi menggunakan rumus (Soepono, 1993:41) :

$$A_{ij} = (E_{ij} - E'_{ij})(r_{ij} - r_n)$$

Dimana :

C'ij : Pengukuran keunggulan kompetitif
 E'ij : PDRB disektor i daerah j
 rij : Laju pertumbuhan di sektor i di daerah j
 rin : Laju pertumbuhan di sektor i di tingkat wilayah referensi (n)

Aij : Pengaruh alokasi, tingkat spesialisasi dikalikan dengan keunggulan kompetitif

(Eij-E'ij): Spesialisasi sektor i pada wilayah j

(rij-rin) : Keunggulan kompetitif atau daya saing wilayah

Tabel 1 Kemungkinan-Kemungkinan dari Pengaruh Alokasi

No	Komponen		Spesialisasi	Keunggulan Kompetitif
	(Eij - E'ij)	(rij-rin)		
1	Positif	Negatif	Ada	Tidak Ada
2	Negatif	Negatif	Tidak Ada	No
3	Negatif	Positif	Tidak Ada	
4	Positif	Positif	Ada	Ada

Sumber : Sudarmono (2006)

Analisis Location Quotient

Analisis ini digunakan untuk menentukan apakah sektor-sektor ekonomi termasuk kegiatan basis atau non basis. Pada metode ini penentu sektor basis dan non basis dilakukan dengan cara menghitung perbandingan antara pendapatan di sektor i pada daerah bawah terhadap pendapatan total semua sektor di daerah bawah terhadap pendapatan total semua sektor di daerah bawah dengan pendapatan di sektor i pada daerah atasnya terhadap pendapatan total semua sektor di daerah atasnya. Daerah nawah dalam penelitian ini adalah wilayah kabupaten Bondowoso, kabupaten Situbondo, kabupaten Sampang, kabupaten Bangkalan dan daerah atasnya adalah Provinsi Jawa Timur. Rumus dari Location Quotient adalah sebagai berikut (Arsyad, 1999:317) :

$$LQ_i = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n}$$

Dimana :

Eij = Produksi sektor i daerah j (Kabupaten)

Ej = Produksi sektor total di daerah j (Kabupaten)

Ein = Produksi sektor i di daerah n (Provinsi Jawa Timur)

En = Produksi sektor total di daerah n (Provinsi Jawa Timur)

Kriteria pengambilan keputusan :

a. Apabila LQ suatu sektor (i) < 1, artinya produksi sektor (i) merupakan sektor basis dan keberadaan didukung oleh *endowment factor* yang cukup.

b. Apabila LQ suatu sektor (i) = 1, artinya produksi sektor (i) hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya saja.

c. Apabila LQ suatu sektor (i) > 1, artinya produksi sektor (i) merupakan sektor non basis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Dari keseluruhan hasil yang dianalisis menggunakan alat analisis *Location Quotient* dan *Shift Share Esteban Marquillas*, maka akan diperoleh sektor-sektor yang memiliki potensi basis dan juga memiliki daya saing di setiap wilayah tertinggal provinsi Jawa Timur. Hal tersebut akan ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Kinerja Sektor (Kompetitif) dan Potensi Wilayah Tertinggal Provinsi Jawa Timur

Kabupaten	Basis (LQ)	Keunggulan Kompetitif (SS)
Bondowoso	1. Pertanian	1. Pertanian
		2. Industri Pengolahan
		3. Listrik, Gas dan Air Bersih
		4. Bangunan
Situbondo	1. Pertanian 2. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1. Pertanian
		2. Industri Pengolahan 3. Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangkalan	1. Pertanian 2. Bangunan 3. Jasa-Jasa	1. Pertanian
		2. Industri Pengolahan
		3. Perdagangan, Hotel dan Restoran 4. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5. Jasa-Jasa
Sampang	1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian	1. Pertanian
		2. Industri Pengolahan
		3. Perdagangan, Hotel dan Restoran
		4. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
		5. Jasa-Jasa

Sumber : Data olahan, 2013

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso memiliki 1 sektor basis yaitu sektor pertanian dan juga 4 sektor kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan.

Kabupaten Situbondo memiliki 2 sektor basis yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dan juga 3 sektor kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan industri listrik, gas dan air bersih.

Kabupaten Bangkalan memiliki 3 sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa dan juga 5 sektor kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa.

Kabupaten Sampang memiliki 2 sektor basis yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalan dan juga 5 sektor kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa.

Pembahasan

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Bondowoso memiliki sektor yang menjadi sektor basis serta memiliki daya saing terhadap sektor di daerah lainnya yaitu sektor pertanian dengan nilai *Location Quotient* sebesar 3,13 dan nilai *Shift Share* sebesar 0,015. Dibuktikan dengan lebih dari 60% penduduk di Kabupaten Bondowoso mata pencahariannya bergantung pada sektor pertanian dan juga sektor pertanian menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar dibanding sektor lainnya di Kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Situbondo memiliki sektor yang menjadi sektor basis serta memiliki daya saing terhadap sektor di daerah lainnya yaitu sektor pertanian dengan nilai *Location Quotient* sebesar 2,18 dan nilai *Shift Share* sebesar 0,013. Hal ini dikarenakan Kabupaten Situbondo memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan juga mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani sehingga sangat mendukung produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan daerah lokal bahkan dapat mengekspor ke luar daerah serta memiliki kekuatan bersaing dengan hasil pertanian wilayah-wilayah lainnya.

Kabupaten Bangkalan memiliki sektor yang menjadi sektor basis serta memiliki daya saing terhadap sektor di daerah lainnya yaitu sektor pertanian dengan nilai *Location Quotient* sebesar 2,33 dan nilai *Shift Share* sebesar 0,007 dan sektor jasa-jasa dengan nilai *Location Quotient* sebesar 1,59 dan nilai *Shift Share* sebesar 0,003. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bangkalan memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan juga mata pencaharian masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian dan untuk sektor jasa-jasa dikarenakan wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki lokasi strategis dengan jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dengan Madura (Suramadu) sehingga perkembangan dan pendistribusian barang khususnya pada sektor jasa-jasa dapat berkembang dengan pesat di Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Sampang memiliki sektor yang menjadi sektor basis serta memiliki daya saing terhadap sektor lainnya yaitu sektor pertanian dengan nilai *Location Quotient* sebesar 2,94

dan nilai *Shift Share* sebesar 0,019. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sampang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan juga produksi tanaman pangan yang dihasilkan oleh sektor pertanian di Kabupaten Sampang cukup besar sehingga sektor pertanian di Kabupaten Sampang mempunyai peranan yang penting dalam sumbangsinya terhadap PDRB Kabupaten Sampang.

Hasil keseluruhan analisis menunjukkan bahwa terdapat kesamaan sektor yang memiliki potensi(basis) serta sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di setiap wilayah tertinggal Provinsi Jawa Timur yaitu sektor pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang mendominasi terhadap pertumbuhan PDRB di setiap wilayah tertinggal Provinsi Jawa Timur, sehingga dibutuhkan kebijakan ekonomi wilayah yang mendukung dalam meningkatkan kebutuhan sektor tersebut seperti kebijakan dalam hal distribusi hasil pertanian, perluasan lahan pertanian, perbaikan sarana prasarana yang menunjang sektor pertanian dan juga peningkatan kualitas SDM dari para petani melalui kelompok tani. Namun, dari hasil tersebut juga menunjukkan bahwa implikasi dari ketertinggalan di setiap wilayah tertinggal karena masih banyaknya sektor-sektor ekonomi yang masih belum berkembang di setiap wilayah tertinggal, sehingga dibutuhkan juga prioritas pembangunan terhadap instrumen-instrumen dalam menunjang sektor yang belum berkembang agar nantinya seluruh sektor mampu meningkat dan bersaing dengan sektor lainnya seperti mengembangkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja dan kemampuan memanfaatkan dan mengelola pasar.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan sektor kompetitif dan sektor basis di setiap wilayah tertinggal di Provinsi Jawa Timur, karena setiap wilayah mempunyai perbedaan karakteristik daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share Esteban Marquillas* (SSEM) wilayah tertinggal di Provinsi Jawa Timur diperoleh simpulan sebagai berikut: kabupaten Bondowoso memiliki 1 sektor basis yaitu sektor pertanian, sedangkan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kabupaten Situbondo memiliki 2 sektor basis yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan, sektor yang memiliki keunggulan kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor jasa-jasa. Kabupaten Bangkalan memiliki 3 sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalan dan sektor jasa-jasa, sedangkan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Kabupaten Sampang memiliki 2 sektor basis yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalan, sedangkan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor

perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Artha Purdiansyah, yang telah membantu dalam penyediaan data.

Referensi

- Abdullah, Pitter. 2002. **Daya Saing Wilayah : Konsep dan Pengukuran di Indonesia**. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln. 1999. **Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah**. BPFE. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2010. **Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima**. UPP STIE YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. **Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan**. UPP AMP YKPN. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. **Analisis Spasial dan Regional : Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia**. UPP-AMP YKPN. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Ayat 1 Pasal 3 tentang *Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. 14 Oktober 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264).
- Rustiadi, dkk. 2011. **Perencanaan dan Pengembangan Wilayah**. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Soepono, Prasetyo. 1993. *Analisis Shift Share Perkembangan dan Penerapan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol VIII. Nomor Halaman 43-54.
- Sudarmono, M. 2006. *Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Daerah di Wilayah Pembangunan I. Jateng*. Diponegoro Journal of Economic. Nomor Halaman 30-37.
- Surakhmad, W. 2001. **Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, dan Teknik**. Penerbit Tarsito. Bandung.
- Tarigan, Robinson. 2002. **Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi**. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2004. **Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi**. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2007. **Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi**. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)